

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia adalah sebuah republik kesatuan yang terdiri dari 34 provinsi (Suhardiman, 2011:2). Dengan banyaknya provinsi-provinsi yang menyatuh dalam tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mewujudkan salah satu provinsi yang dikatakan istimewa yaitu Provinsi Daerah Istimewaan Yogyakarta (DIY).

Setelah perjanjian Giyanti 1755 M, Kerajaan Mataram dipecah menjadi 2 bagian yakni kerajaan Surakarta yang dipimpin Susuhunan Pakubuwana III dan kerajaan Ngayogyakarta di bawah Pangeran Mangkubumi diakui sebagai Sultan Hamengku Buwono I yang bergelar Senopati Ing Ngalaga Sayidin Panatagama Khalifatullah dengan kratonnya di Yogyakarta. Atas kehendak Sultan Hamengku Buwono I kota Ngayogyakarta dijadikan ibukota kerajaan. Sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I pada tahun 1813 (Laksono, 2005: 46).

Menurut, Laksono (2005) Perjanjian Giyanti adalah kesepakatan antara VOC, pihak Mataram (diwakili oleh Sunan Pakubuwana III), dan kelompok Pangeran Mangkubumi. Kelompok Pangeran Sambernyawa tidak dilibatkan dalam perjanjian ini. Pangeran Mangkubumi demi keuntungan

pribadi memutar haluan menyeberang dari mendukung kelompok pemberontak bergabung dengan kelompok pemegang legitimasi kekuasaan yang memerangi pemberontak yaitu Pangeran Sambernyawa. Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 ini secara de facto dan de jure menandai berakhirnya Kerajaan Mataram yang sepenuhnya independen. Nama *Giyanti* diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian ini, yaitu di Desa Giyanti. (Laksono, 2005: 46-47).

Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Mataram dibagi dua: wilayah di sebelah timur Kali Opak (melintasi daerah Prambanan sekarang) dikuasai oleh pewaris tahta Mataram (yaitu Sunan Pakubuwana III) dan tetap berkedudukan di Surakarta, sementara wilayah di sebelah barat (daerah Mataram yang asli) diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi sekaligus ia diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwana I yang berkedudukan di Yogyakarta. Di dalamnya juga terdapat klausul, bahwa pihak VOC dapat menentukan siapa yang menguasai kedua wilayah itu jika diperlukan (Bahar, 1993 : 37).

Menurut dokumen register harian N. Hartingh (Gubernur VOC untuk Jawa Utara), pada tanggal 10 September 1754 N. Hartingh berangkat dari Semarang untuk menemui Pangeran Mangkubumi. Pertemuan dengan Pangeran Mangkubumi sendiri baru pada 22 September 1754. Pada hari berikutnya diadakan perundingan yang tertutup dan hanya dihadiri oleh sedikit orang. Pangeran Mangkubumi didampingi oleh Pangeran Notokusumo dan Tumenggung Ronggo. Hartingh didampingi Breton, Kapten Donkel, dan sekretaris Fockens. Sedangkan yang menjadi juru bahasa adalah Pendeta Bastani. (Hadiwijoyo, 2009: 41)

Pembicaraan pertama mengenai pembagian Mataram. N. Hartingh menyatakan keberatan karena tidak mungkin ada dua buah matahari. Mangkubumi menyatakan di Cirebon ada lebih dari satu Sultan. Hartingh menawarkan Mataram sebelah timur. Usul ini ditolak sang Pangeran. Perundingan berjalan kurang lancar karena masih ada kecurigaan di antara mereka. Akhirnya setelah bersumpah untuk tidak saling melanggar janji maka pembicaraan menjadi lancar. Kembali Gubernur VOC mengusulkan agar Mangkubumi jangan menggunakan gelar Sunan, dan menentukan daerah mana saja yang akan dikuasai oleh dia. Mangkubumi berkeberatan melepas gelar Sunan karena sejak 5 tahun lalu diakui rakyat sebagai Sunan. (Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sunan [Yang Dipertuan] atas kerajaan Mataram ketika Paku Buwono II wafat di daerah Kabanaran, bersamaan VOC melantik Adipati Anom menjadi Paku Buwono III).

Perundingan terpaksa dihentikan dan diteruskan keesokan harinya. Pada 23 September 1754 akhirnya tercapai nota kesepahaman bahwa Pangeran Mangkubumi akan memakai gelar Sultan dan mendapatkan setengah Kerajaan. Daerah Pantai Utara Jawa (orang Jawa sering menyebutnya dengan daerah pesisiran) yang telah diserahkan pada VOC (orang Jawa sering menyebut dengan Kumpeni) tetap dikuasai VOC dan ganti rugi atas penguasaan Pantura Jawa oleh VOC akan diberikan setengah bagiannya pada Mangkubumi. Terakhir, Pangeran memperoleh setengah dari pusaka-pusaka istana. Nota kesepahaman tersebut kemudian disampaikan pada Paku Buwono III. Pada 4 November tahun yang sama, Paku Buwono III menyampaikan surat pada Gubernur Jenderal VOC Mossel atas persetujuan dia terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa

Utara dan Mangkubumi. (FLAMMA Edisi 15, *Perjanjian Giayanti* IRE, Yogyakarta).

Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta merupakan daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri atau disebut *Zelfbestuur landschappen*/Daerah Swapraja, yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I pada tahun 1755, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I pada tahun 1813. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan, dan Pakualaman sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangganya sendiri yang dinyatakan dalam kontrak politik. Kontrak politik yang terakhir Kasultanan tercantum dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 47, sedangkan kontrak politik Pakualaman dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 577. Eksistensi kedua kerajaan tersebut telah mendapat pengakuan dari dunia internasional, baik pada masa penjajahan Belanda, Inggris, maupun Jepang. Ketika Jepang meninggalkan Indonesia, kedua kerajaan tersebut telah siap menjadi sebuah negara sendiri yang merdeka, lengkap dengan sistem pemerintahannya (susunan asli), wilayah, dan penduduknya. (FLAMMA Edisi 15, *Perjanjian Giayanti* , IRE, Yogyakarta).

Menurut, Reyandhi (2004:1-2), Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI, bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta, dan Daerah Pakualaman menjadi wilayah Negara RI,

bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Hal tersebut dinyatakan dalam:

1. Piagam kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI.
2. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (dibuat secara terpisah).
3. Amanat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (dibuat dalam satu naskah).

Dalam perjalanan sejarah selanjutnya kedudukan DIY sebagai Daerah Otonom setingkat Provinsi sesuai dengan maksud pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 (sebelum perubahan) diatur dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah. Sebagai tindak lanjutnya kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah, dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan DIY meliputi Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Daerah Kadipaten Pakualaman. Pada setiap undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui, sebagaimana

dinyatakan terakhir dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.
(Hadiwijoyo, 2009: 51)

Dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), DIY mempunyai peranan yang penting. Terbukti pada tanggal 4 Januari 1946 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 pernah dijadikan sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia. Tanggal 4 Januari inilah yang kemudian ditetapkan menjadi hari Yogyakarta Kota Republik pada tahun 2010. Pada saat ini Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Kadipaten Pakualaman dipimpin oleh Sri Paku Alam IX, yang sekaligus menjabat sebagai Gubernur, dan Wakil Gubernur DIY. Keduanya memainkan peran yang menentukan dalam memelihara nilai-nilai budaya, dan adat istiadat Jawa dan merupakan pemersatu masyarakat Yogyakarta (Reyandhi,2004: 5).

Menurut Mukhtasar, setelah keluarnya keputusan Raja Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X mengeluarkan sabdaraja di Siti Hinggil Keraton, Kamis, 30 April 2015 pukul 10.00 WIB. Acara ini berlangsung singkat dan digelar secara tertutup. Dalam sabdaraja, Sultan menyampaikan pergantian nama bukan semata-mata keinginannya, melainkan berdasar petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa dan para leluhur. Peristiwa ini merupakan sabda raja pertama sejak Sultan Hamengku Buwono X naik tahta pada 1989 (Sabda Raja Kraton Yogyakarta, Opini, *Kedaulatan Rakyat*. Mei 2015).

Isi Sabda Raja dalam bahasa Jawa. Sebagai berikut:

Gusti Allah Gusti Agung Kuasa cipta paringana sira kabeh adiningsun sederek dalem sentolo dalem lan Abdi dalem. Nampa welinge dhawuh Gusti Allah Gusti Agung Kuasa Cipta lan rama ningsun eyang eyang ingsun, para leluhur Mataram Wiwit waktu iki ingsun Nampa dhawuh kanugrahan Dhawuh Gusti Allah Gusti agung, Kuasa Cipta Asma kelenggahan Ingsun Ngarso Dalem Sampean Dalem Inkgang Sinuhun Sri Sultan Hamengku Bawono Inkgang Jumeneng Kasepuluh Surya Ning Mataram Senopati ing Ngalaga Langgenging Bawono langgeng ing tata Panatagama. Sabda Raja iki perlu dimengerteni diugemi lan ditindake yo mengkono.

Dalam bahasa Indonesia, Sabda Raja tersebut artinya:

Allah, Tuhan yang Agung, Maha Pencipta, ketahuilah para adik-adik, saudara, keluarga di Keraton dan abdi dalem, saya menerima perintah dari Allah, ayah saya, nenek moyang saya dan para leluhur Mataram, mulai saat ini saya bernama Sampean Dalem Inkgang Sinuhun Sri Sultan Hamengkubawono Inkgang Jumeneng Kasepuluh Surya ning Mataram, Senopati ing Kalogo, Langgenging Bawono Langgeng, Langgeng ing Toto Panotogomo. Sabda Raja ini perlu dimengerti, dihayati dan dilaksanakan seperti itu sabda saya.

Inti dari Sabda Raja Sri Sultan Hamengku Buwono X adalah sebagai berikut (Isi SabdaRaja Kraton Yogyakarta, Opini, *Kedaulatan Rakyat*. 5 Mei 2015) :

1. Penyebutan Buwono diubah menjadi Bawono
2. Tidak lagi menggunakan gelar Khalifatullah
3. Penyebutan kaping sedasa diganti kaping sepuluh
4. Mengubah perjanjian antara pendiri Mataram Ki Ageng Giring dengan Ki Ageng Pemanahan
5. Menyempurnakan keris Kanjeng Kyai Ageng Kopek dengan Kanjeng Kyai Ageng Joko Piturun.

Berikut isi Dawuh Raja yang dikeluarkan Sri Sultan Hamengku Buwono X pada 5 Mei 2015:

Siro adi ingsun, sekseono ingsun Sampean Dalem Inkgang Sinuhun Sri Sultan Hamengku Bawono Inkgang Jumeneng Kasepuluh Surya ning Mataram, Senopati ing Kalogo, Langenging Bawono Langgeng, Langgeng ing Toto Panotogomo Kadawuhan netepake Putri Ingsun Gusti Kanjeng Ratu Pembayun tak tetepake Gusti Kanjeng Ratu GKR Mangkubumi. Mangertenono yo mengkono dawuh ingsun.

Dalam bahasa Indonesia, Dawuh Raja tersebut artinya:

Saudara semua, saksikanlah saya Sampean Dalem Inkgang Sinuhun Sri Sultan Hamengku Bawono Inkgang Jumeneng Kasepuluh Surya ning Mataram, Senopati ing Kalogo, Langenging Bawono Langgeng, Langgeng

ing Toto Panotogomo mendapat perintah untuk menetapkan Putri saya Gusti Kanjeng Ratu Pembayun menjadi Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng ing Mataram. Mengertilah, begitulah perintah saya.

Menurut Jazir, Sabda Raja yang disampaikan Sri Sultan Hamengku buwono X menjadi tanda berakhirnya perjanjian antara Ki Ageng Giring dengan Ki Ageng Pemanahan. Selama ini perjanjian itulah yang menjadi dasar munculnya Mataram baru di Yogyakarta sesuai dengan perubahan gelar Sultan. "Dasare perjanjian Ki Ageng Giring sampun rampung mboten saged dipun ewahi (perjanjian antara Ki Ageng Giring sudah selesai dan itu tidak bisa diubah)," kata Sultan. Hal ini disampaikan Sultan saat memberi penjelasan soal Sabda Raja di Ndalem Wironegaran, Kraton, Yogyakarta, Sultan menjelaskan, Mataram Lama dari zaman Ken Arok Singosari sampai Kerajaan Pajang. Sedangkan Mataram Baru adalah berdasar pada perjanjian antara Ki Ageng Pemanahan (FLAMMA Edisi 15, *Serial Polimik Keistimewaan*, IRE, Yogyakarta).

Menurut Gusti Yudha, dawuh alias perintah Raja yang dikeluarkan Sultan Yogyakarta Hamengku Buwono X ditentang adik-adiknya. Khususnya perubahan gelar putri sulung Sultan, yakni Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun yang berganti gelar menjadi GKR Mangkubumi alias putri mahkota. Salah satu adik Sultan, Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Yudhoningrat, menyatakan tak pernah ada dalam sejarah pengangkatan putri mahkota sebagai penerus tahta. GBPH Yudhaningrat langsung memberikan pernyataan bahwa sabdaraja ini berpotensi merusak tatanan (*paugeran*) Kraton Yogyakarta. Pergantian dalam sabdaraja tersebut

akan merusak tatanan yang sudah baku dan turun temurun sejak berdiri Kraton Mataram Islam. Perubahan ini juga lebih jauh berpotensi mengubah perjanjian Kraton Yogyakarta dan NKRI. (<http://news.liputan6>).

Selanjutnya, perubahan gelar sultan menyelisihi UU Keistimewaan DIY Pasal 1. Secara eksplisit disebutkan bahwa gelar dan nama sultan mengikuti paugeran awal yaitu “*Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayyidin Panatagama Kalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Sedana Ing Ngayogyakarta Hadiningrat*”.

KGPH Hadiwinoto menegaskan bahwa Sabda Raja batal demi hukum. Alasannya antara lain pengucapan Sabda Raja bertentangan dengan *paugeran* (aturan keraton) dan protokolernya. Atribut dan pakaian yang dikenakan Sultan saat itu bukanlah pakaian kebesaran yang seharusnya dikenakan raja. Sultan mengenakan pakaian kebesaran yang berbordir dan mengenakan *kuluk* (penutup kepala) warna biru muda. Atribut itu biasa dikenakan oleh putra mahkota yang belum dinobatkan menjadi raja. Sedangkan pakaian kebesaran raja yang seharusnya dikenakan adalah *kanigoro* dan *sikepan* lugas serta *kuluk* warna hitam. Pengucapan juga dilakukan di Sitihinggil yang merupakan tempat raja bertahta. Mestinya di Bangsal Manguntur Tangkil yang merupakan tempat tertinggi di Keraton Yogyakarta. (<https://www.selasar.com/politik/petaka-politik-pasca-sabda-raja>, diakses pada 16 November 2015).

Menurut setiawan, Sabda Raja telah menimbulkan gejolak serius di internal kraton maupun masyarakat luas, khususnya di Jogja. Pro dan kontra bermunculan. Pihak pro mendasarkan pilihan karena Sabda Raja merupakan hak prerogatif HB X. Sedangkan pihak kontra menilai substansi Sabda Raja telah melenceng dari tatanan (*paugeran*) Kraton Yogyakarta. Kondisi ini jika semakin memanas rentan menimbulkan petaka konflik politik. Aspirasi penolakan Sabda Raja juga mulai bermunculan dari publik Jogja. Penolakan tersebut dapat terbaca dari beberapa spanduk yang mulai terpasang serta pernyataan alim ulama Jogja. Semua sama yaitu menyayangkan dan menghendaki Kraton Yogyakarta kembali ke *paugeran*. (SabdaRaja Timbulkan Pro-Kontra, *Opini, Kedaulatan Rakyat*. Mei 2015)

Pak Jono menuturkan bahwa sebagai rakyat biasa harus diikuti seluruh kaulah/rakyatnya terutama masyarakat Yogyakarta, tapi karena sabdaraja itu bervariasi atau anggapan dari kerabat kraton sendiri yang ada hubungannya dengan kraton itu tidak sependapat dengan keluarnya sabdaraja Sri Sultan Hamengku buwono X. Menurut saya pribadi sebagai masyarakat Yogyakarta dengan adanya sabdaraja itu bagus, karena ada sesuatu atau permasalahan raja pasti mengeluarkan sabda dan ini hubungannya sangat jelas. Dalam konteks raja yang bertahta sekarang itu mengeluarkan sabda intinya karena beliau tidak punya keturunan laki-laki. Lalu tentu jelas anak perempuan pertama yang melanjutkan tahta ayahnya (Wawancara dengan Pak Jono 45 tahun, *Tukang Becak Malioboro* pada Sabtu 5 September 2015).

Dalam wawancara dengan penulis, Ibu Yuli (7 September 2015) mengatakan Adapun tanggapan dari masyarakat dengan keluarnya sabdaraja, karena dengan adanya sabdaraja beberapa tahun kedepan Kota Yogyakarta akan dipimpin oleh seorang ratu dan ini menjadi hal yang baru bagi masyarakat Yogyakarta. Kita bisa saja melihat sendiri dulu Indonesia juga dipimpin oleh seorang perempuan yaitu Ibu Megawati. Saya pribadi apabila Yogyakarta dipimpin oleh seorang ratu, saya terima-terima saja asalkan mampu membuat masyarakat lebih baik, makmur dan sejahtera.

Kalau kita berbicara tentang munculnya sabdaraja Sri Sultan Hamengku buwono X menjadi salah satu penghinaan terhadap para leluhur kraton Yogyakarta. Kita berkaca dari Sri Sultan Hamengku buwono I sampai dengan Sri Sultan Hamengku buwono X Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh seorang raja bukan seorang ratu. Oleh sebab itu ketika Kraton Yogyakarta dipimpin oleh seorang ratu maka hilanglah keistimewaan Yogyakarta dan perjanjian-perjanjian para leluhur. “Saya sendiri berpendapat Yogyakarta tidak akan istimewa lagi ketika Yogyakarta dipimpin oleh seorang ratu” (*Wawancara* dengan Pak Suratman 48 tahun, *masyarakat sekitar kraton* pada Jum’at 9 Oktober 2015).

Sri Hamengku Buwono X dalam siaran persnya menyampaikan bahwa Sabda Raja ini final dan tidak akan ditinjau lagi. Sabda Raja keluar sebagai pertanda telah lahirnya zaman baru. Artinya, dinasti Hamengku Buwono telah berakhir. Dampak serius yang berpotensi terjadi adalah petaka konflik horizontal. Internal kraton dan publik mulai terbelah. Pembelajaran sebenarnya sudah diberikan dari dinamika Kraton Surakarta. (SabdaRaja itu Mutlak, Opini, *Kedaulatan Rakyat*. 13 Mei 2015).

Untuk itulah muncul polemik dalam mencari jalan keluar mengenai keluarnya Sabdaraja Sri Sultan Hamengku Buwono X. Polemik yang dimaksud adalah terbentuknya dua kubu pendapat, yakni di antara masyarakat Kota Yogyakarta dan bagian dari Internal Kraton yang memiliki aspirasi berbeda. Masyarakat Yogyakarta mengharapkan agar permasalahan polemik Sabdaraja cepat diselesaikan. Setelah sebelum terjadi pro-kontra tentang polemik Sabdaraja Hamengku Buwono X dan pergantian tahta seorang perempuan menjadi pemimpin di Yogyakarta. Maka sangat menarik penulis menggangkat permasalahan ini untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Kota Yogyakarta terhadap keluarnya Sabdaraja Sri Sultan Hamengku Buwono X.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah sabda raja dapat diterima dalam persepsi masyarakat sebagai suatu logika pemerintahan ?
2. Apakah sabda raja dapat diterima dalam persepsi masyarakat sebagai suatu etika pemerintahan ?
3. Apakah sabda raja dapat diterima dalam persepsi masyarakat sebagai suatu estetika pemerintahan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui apakah sabda raja dapat diterima dalam persepsi masyarakat sebagai suatu logika pemerintahan.
2. Untuk mengetahui apakah sabda raja dapat diterima dalam persepsi masyarakat sebagai suatu etika pemerintahan.
3. Untuk mengetahui apakah sabda raja dapat diterima dalam persepsi masyarakat sebagai suatu estetika pemerintahan.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan, menjadi bahan kajian dalam studi ilmu pemerintahan khususnya yang berkenaan dengan polimik Sabdaraja Hamengku Buwono Ke-X.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini di harapkan menjadi bahan masukan atau rekomendasi bagi internal kraton dan masyarakat Yogyakarta setelah keluarnya sabdaraja Hamengku Buwono Ke-X.

E. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan bagian yang terdiri dari uraian yang menjelaskan variable-variable dan hubungan-hubungan antara variable berdasarkan konsep definisi tertentu. Dan di dalam bagian ini ditemukan teori yang menjadi acuan bagi penelitian yang akan dilakukan.

Menurut Singarimbun (2005) teori adalah serangkaian konsep, definisi, proposisi saling keterkaitan, bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, ini dijabarkan dengan hubungan variable yang satu dengan yang lain dengan tujuan untuk dapat menjelaskan fenomena tersebut.

Menurut Koentjoroningrat (2002), teori merupakan pernyataan mengenai adanya hubungan positif antara gejala yang diteliti dengan satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.

Dari uraian diatas maka penulis dapat mengambil pengertian bahwa teori merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variable-variable yang diteliti dan pemecahan masalah secara teoritis. Kerangka dasar teori akan memberikan landasan teoritis dalam menganalisis data tentang persepsi masyarakat Kota Yogyakarta terhadap sabdaraja Hamengku Buwono X dalam konflik internal kraton. Untuk menjawab permasalahan mengenai data dari hasil penelitian, penulis menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan objek penelitian diantaranya yaitu teori persepsi, politik sabdaraja dan teori konflik.

1. Persepsi

a. Definisi Persepsi

Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris *Perception* berasal dari bahasa Latin *perception*, dari *percipere*, yang artinya penerimaan atau mengambil. Persepsi pada dasarnya merupakan suatu proses yang terjadi dalam pengamatan seseorang terhadap orang lain. Pemahaman terhadap suatu informasi yang disampaikan oleh orang lain yang sedang saling berkomunikasi, berhubungan atau berkerjasama, jadi setiap orang tidak terlepas dari proses persepsi. (Sobur, 2010: 445)

Persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita. (Mulyana, 2007: 79)

Definisi lain tentang persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi, dan menafsirkan pesan. Persepsi memberikan makna pada stimuli inderawi (*sensory stimuli*). (Rakhmat, 2009: 57)

Sementara Devito (2002) mendefinisikan persepsi sebagai proses yang menjadikan kita sadar akan banyaknya yang mempengaruhi indera kita. Brian Fellows juga mendefinisikan persepsi sebagai proses yang

memungkinkan kita memperoleh kesadaran menerima dan menganalisis informasi. (Mulyana, 2007: 180)

Menurut Sarwono (1983:89), Persepsi adalah kemampuan seseorang untuk mengorganisir suatu pengamatan, kemampuan tersebut antara lain; kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk mengelompokan, dan kemampuan untuk memfokuskan. Oleh karena itu seseorang bisa saja memiliki persepsi yang berbeda, walaupun objeknya sama. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan dalam hal sistem nilai dan ciri kepribadian individu yang bersangkutan. Sedangkan menurut Leavit, 1978 yang di ambil dari Faradina, Triska (2007:8) persepsi memiliki pengertian dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit persepsi yaitu penglihatan: bagaimana seseorang melihat sesuatu, dan dan dalam arti luas persepsi yaitu: pandang atau pengertian, bagaimana seseorang memandang atau mengartikan.

Sondang (1989) berpendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses dimana seseorang mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan-kesan sensorisnya dalam usahanya memberikan suatu makna tertentu dalam lingkungannya. Indrajaya (1986) dalam Prasilika, Tiara H. (2007:10) berpendapat presepsi adalah proses dimana seseorang memngorganisasikan dalam pikirannya, memanfaatkan, mengalami dan mengelolah perbedaan dalam segala sesuatu yang terjadi dalam lingkungannya.

Dari kesimpulan di atas penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa kata “Persepsi” seringkali digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, perlu di ketahui apa makna sebenarnya dari persepsi itu sendiri? Menurut pengertian dari beberapa ahli, yang penulis simpulkan secara sederhana dalam tulisan ini adalah setiap individu atau kelompok orang dalam kehidupan sehari-hari akan menerima rangsangan berupa kejadian, informasi, objek, dan lainnya yang berasal dari lingkungan sekitar, rangsangan tersebut akan diberi makna atau arti oleh setiap orang, dapat dilihat dari proses pemberian makna atau arti tersebut dinamakan persepsi. Setiap orang akan menerima segala sesuatu berupa informasi ataupun segala rangsangan yang datang dari lingkungannya, dalam batas-batas kemampuannya, segala rangsangan yang diterimanya tersebut diolah, selanjutnya diproses.

b. Pengukuran Persepsi

Mengukur persepsi hampir sama dengan mengukur sikap. Walaupun materi yang diukur bersifat abstrak, tetapi secara ilmiah sikap dan persepsi dapat diukur, dimana sikap terhadap obyek diterjemahkan dalam sistem angka. Dua metode pengukuran sikap terdiri dari metode *Self Report* dan pengukuran *Involuntary Behavior*.

1. *Self Report* merupakan suatu metode dimana jawaban yang diberikan dapat menjadi indikator sikap seseorang. Namun kelemahannya adalah bila individu tidak menjawab pertanyaan yang diajukan maka tidak dapat mengetahui pendapat atau sikapnya.
2. *Involuntary Behaviour* dilakukan jika memang diinginkan atau dapat dilakukan oleh responden, dalam banyak situasi akurasi pengukuran sikap dipengaruhi kerelaan responden (Azzahy, 2010).

Jika merujuk pada pernyataan diatas, bahwa mengukur persepsi hampir sama dengan mengukur sikap, maka skala sikap dapat dipakai atau dimodifikasi untuk mengungkap persepsi sehingga dapat diketahui apakah persepsi seseorang positif, atau negatif terhadap suatu hal atau obyek.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi seseorang tidak timbul begitu saja, tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Krech dan Crutchfield (1977) menyebutnya sebagai faktor fungsional, faktor struktural, faktor situasional, dan faktor personal. (Rakhmat, 2009: 58)

1. Faktor Fungsional

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal yang lain termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal. Yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberikan respons pada stimuli itu. Dari sisi Krech dan Crutchfield merumuskan dalil persepsi yang pertama, yaitu: persepsi bersifat selektif. Ini berarti bahwa objek-objek yang mendapatkan tekanan dalam persepsi kita biasanya objek-objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi.

2. Faktor Struktural

Faktor struktural berasal semata-mata dari sifat stimuli fisik dan efek-efek staf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu. Dari sini Krech dan Crutchfield melahirkan dalil persepsi yang kedua, yaitu: medan perseptual dan kognitif selalu diorganisasikan dan diberi arti.

3. Faktor Situasional

Faktor ini banyak berkaitan dengan bahasa nonverbal. Petunjuk prosemik, petunjuk kinesik, petunjuk wajah, petunjuk paralinguistik adalah beberapa faktor-faktor situasional yang mempengaruhi.

4. Faktor Personal

Faktor personal terdiri atas pengalaman, motivasi, dan kepribadian. Pengalaman bertambah melalui rangkaian peristiwa yang pernah dihadapi. Sementara motivasi adalah faktor yang mempengaruhi stimuli yang akan diproses. Sedangkan kepribadian adalah ragam pola tingka laku dan pikiran yang memiliki pola tetap yang dapat dibedakan dari orang lain yang merupakan karakteristik seorang individu.

Persepsi adalah inti komunikasi, sedangkan penafsiran (*interpretasi*) adalah inti persepsi, yang identik dengan penyandian-penyandian balik (*decoding*) dalam proses komunikasi. (Mulyana, 2007: 170)

Persepsi disebut inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, tidak mungkin kita berkomunikasi efektif. Persepsilah yang menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi antarindividu, semakin mudah dan semakin sering sering mereka berkomunikasi, dan sebagai konsekuensinya, semakin cenderung membentuk kelompok budaya atau kelompok identitas.

d. Proses Persepsi

Persepsi merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah rangsangan diterapkan kepada manusia. Subproses psikologi lainnya adalah pengenalan penalaran, perasaan dan tanggapan.

Secara singkat persepsi dapat didefinisikan sebagai cara manusia menangkap rangsangan. Penalaran adalah proses sewaktu rangsangan dihubungkan dengan rangsangan lainnya pada tingkat pembentukan psikologi. Perasaan adalah konotasi emosional yang dihasilkan oleh rangsangan baik sendiri atau bersama-sama dengan rangsangan lain pada tingkat kongnitif atau konseptual.

Dari segi psikologi dikatakan bahwa tingkah laku seseorang merupakan fungsi dari cara dia memandang. Oleh sebab itu untuk mengubah tingkah laku seseorang harus dimulai dengan mengubah persepsinya. (Sobur, 2010: 446)

Persepsi adalah sumber pengetahuan kita tentang dunia, kita ingin mengenali dunia dan lingkungan yang mengenalinya. Pengetahuan adalah kekuasaan. Tanpa pengetahuan kita tidak dapat bertindak secara efektif. Persepsi adalah sumber utama dari pengetahuan itu. Dari definisi yang dikemukakan oleh Perek yaitu: “ persepsi adalah proses penerima, menyelesaikan mengorganisir, mengartikan dan memberikan reaksi kepada yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Proses menerima rangsangan

Proses pertama dalam persepsi adalah menerima rangsangan atau data dari berbagai sumber. Kebanyakan data diterima melalui panca indera. Kita melihat sesuatu, mendengar, mencium, merasakan, atau menyentuhnya sehingga kita mempelajari segi-segi lain dari sesuatu itu.

2. Proses menyeleksi rangsangan

Setelah rangsangan diterima atau data diseleksi. Tidaklah mungkin untuk memperhatikan semua rangsangan yang telah diterima. Demi menghemat perhatian yang digunakan, rangsangan-rangsangan itu dirasing dan diseleksi untuk proses yang lebih lanjut.

3. Proses pengorganisasian

Rangsangan yang diterima selanjutnya diorganisasikan dalam suatu bentuk. Ada tiga dimensi utama dalam pengorganisasian rangsangan, yakni pengelompokan (berbagai rangsangan yang diterima dikelompokkan dalam suatu bentuk), bentuk timbul dan datar (dalam melihat rangsangan atau gejala, ada kecenderungan untuk memusatkan perhatian pada gejala-gejala tertentu yang timbul menonjol, sedangkan gejala atau rangsangan yang lain berada di latar belakang), kemantapan persepsi (ada suatu kecenderungan untuk menstabilkan persepsi, dan perubahan-perubahan konteks tidak mempengaruhinya).

4. Proses penafsiran

Setelah rangsangan atau data diterima dan diatur, si penerima lalu menafsirkan data itu dengan berbagai cara. Dikatakan bahwa telah terjadi persepsi setelah data itu ditafsirkan. Persepsi pada dasarnya memberikan arti pada berbagai data dan informasi yang diterima.

5. Proses pengecekan

Setelah data diterima dan ditafsirkan, si penerima mengambil tindakan untuk mengecek apakah penafsirannya benar atau salah. Proses ini terlalu cepat dan orang mungkin tidak menyadarinya.

6. Proses reaksi

Tahap terakhir dari proses perseptual adalah tindakan sehubungan dengan apa yang telah diserap. Hal ini biasanya dilakukan jika seseorang bertindak sehubungan dengan persepsinya.

e. Macam-macam persepsi

Terdapat dua macam persepsi, yaitu External Perception, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar diri individu dan Self Perception, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari dalam diri individu. Dalam hal ini yang menjadi objek adalah dirinya sendiri. Dengan persepsi, individu dapat menyadari dan dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya maupun tentang keadaan diri individu (Sunaryo, 2004).

f. Syarat terjadinya persepsi

Syarat timbulnya persepsi yakni, adanya objek, adanya perhatian sebagai langkah pertama untuk mengadakan persepsi, adanya alat indra sebagai reseptor penerima stimulus yakni saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak dan dari otak dibawa melalui saraf motoris sebagai alat untuk mengadakan respons (Sunaryo, 2004).

Secara umum, terdapat beberapa sifat persepsi, antara lain bahwa persepsi timbul secara spontan pada manusia, yaitu ketika seseorang berhadapan dengan dunia yang penuh dengan rangsangan. Persepsi merupakan sifat paling asli yang merupakan titik tolak perubahan. Dalam mempersepsikan tidak selalu dipersepsikan secara keseluruhan, mungkin cukup hanya diingat. Persepsi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi atau bergantung pada konteks dan pengalaman (Baiqhaqi, 2005).

2. Sabdaraja Keraton Yogyakarta

Raja Kraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X memastikan surat penjelasan Sabdaraja akan segera dikirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Terkait permintaan dewan untuk menjelaskan Paugeran kepada publik, Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan bahwa dirinya sudah bertemu dengan perwakilan dari masyarakat baik itu ulama dan sebagainya, tetapi hal tersebut tidak dipublikasikan. (Soal Internal Kraton Yogyakarta, Opini, *Kedaulatan Rakyat*. Mei 2015)

Menanggapi penolakan Sabdaraja maupun Dhawuhraja dari 11 adik-adiknya, Sultan Hamengku Buwono X masih menyangsikan apakah betul seluruh adik-adiknya tersebut tidak sependapat. Pasalnya, ada Beberapa adik-adiknya yang berdomisili di Jakarta justru telah bertemu dengannya, sementara Adik-adik yang berdomisili di Yogyakarta justru belum bertemu dengan dirinya. Terlebih mengenai permintaan rayi-rayi dalam tersebut agar membatalkan demi hukum sabda raja maupun dhawuh raja, Sultan justru bertanya balik “ batal demi hukum itu apa ? ini aturan keraton bukan undang-undang atau konstitusi republik. Jadi demi hukum yang mana?. Misalkan ada tradisi itu hukum yang mana bisa membatalkannya. Sultan itu kan mutlak, “ imbuhnya. Dengan demikian sabda raja dari Sultan itu mutlak. (Sultan SabdaRaja itu Mutlak, Opini, *Kedaulatan Rakyat*. 13 Mei 2015)

Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X membenarkan ada penghapusan gelar Khalifatullah yang melekat padanya. Pelepasan gelar itu saat Sultan HB X menyampaikan Sabda Raja pertama pada 30 April 2015 secara tertutup. Meski hilang, namun nama itu diganti dengan sebutan Panoto Gomo. Alasan Sultan menghapus nama Khalifah karena mendapat ‘perintah’ langsung dari leluhurnya. Perintah itu diperoleh sehari sebelum menyampaikan Sabda Raja. “Saya hanya menyampaikan pesan dari leluhur. Saya tidak berani menentang leluhur karena ini perintah yang harus saya jalankan,” kata Sultan dalam penjelasan terbuka terkait sabda raja di Pendopo Ndalem Wironegaran, tempat tinggal putri sulungnya, GKR Mangkubumi, Jumat (8/5/2015). Sultan tak menepis pergantian nama itu menuai risiko, seperti yang selama

ini menjadi terjadi di masyarakat. Namun, Sultan punya alasan tetap menghilangkan nama Khalifatullah karena itu perintah dari leluhurnya. “Semua ada risiko, saya yang menjalankan perintah juga memiliki risiko, tapi saya lebih takut jika perintah leluhur tidak dijalankan,” jelasnya.

Risiko itu seperti penolakan dari kerabat-kerabatnya maupun masyarakat umum. Sultan juga berharap tidak terjadi hal yang buruk pada siapa saja yang menentang sabda raja. Dia tidak akan mempermasalahkan karena melihat sabda raja akan keliru jika menggunakan logika atau pikiran. “Orang Jawa itu kan melihat sesuatu dengan rasa, bukan pikiran. Kalau dengan pikiran, apa yang dilihat keliru. Yang benar itu belum tentu benar (pas atau sesuai),” ujarnya.

Tuhan Allah, Tuhan Agung, Maha Pencipta, ketahuilah para adik-adik, saudara, keluarga di Kraton dan abdi dalem, saya menerima perintah dari Allah, ayah saya, nenek moyang saya dan para leluhur Mataram, mulai saat ini saya bernama Sampean Dalem Inkgang Sinuhun Sri Sultan Hamengku Bawono Inkgang Jumeneng Kasepuluh Surya ning Mataram, Senopati ing Kalogo, Langenging Bawono Langgeng, Langgeng ing Toto Panotogomo. Sabda Raja ini perlu dimengerti, dihayati dan dilaksanakan seperti itu sabda saya.

Sri Sultan Hamengku Buwono X tiba-tiba mengeluarkan perintah tertinggi atau *sabdatama* di Bangsal Kencana Keraton Yogyakarta. Dalam delapan poin perintah raja yang ditulis dalam bahasa Jawa itu, tertuang dengan tegas bahwa Sri Sultan HB X tidak menghendaki orang di luar keraton ikut campur urusan suksesi takhta Keraton Mataram Yogyakarta.

Hal itu tersirat dengan pernyataan pada poin *pertama*, yakni *ora isa sopo wae, ngungkuli utowo ndhuwuri mungguhing kraton* (tidak seorang pun boleh melebihi kewenangan keraton/raja). Sebelum membacakan pernyataan tersebut, Sultan yang berbusana Jawa lengkap didampingi permaisurinya, GKR Hemas dan Sri Paduka Paku Alam IX, berkata, "*Mangertiya, ingsun uga netepi pranatan, paugeran lan janjiku marang Gusti Allah, Gusti Agung kang kuasa lan cipta uga marang leluhur kabeh. Mulo ingsun paring dhawuh yaiku,*" (Mengertilah, aku juga mematuhi aturan, tata krama, dan janji terhadap Tuhan yang Mahakuasa, serta menghormati para leluhur. Oleh karena itu, aku memberi perintah).

"Poin *kedua*, Sri Sultan menyebutkan, "*Ora isa sopo wae mutusake utawa rembugan babagan Mataram, luwih-luwih kalenggahan tatanan Mataram. Kalebu gandheng cenenge karo tatanan pamerintahan. Kang bisa mutusne Raja.* (Tidak seorang pun bisa memutuskan atau membicarakan persoalan Mataram. Terlebih berkaitan dengan Raja, termasuk tatanan dan aturan pemerintahannya. Yang bisa memutuskan hanya Raja."

Ketiga, *marang sopo wae kang kaparingan kalenggahan, manut karo Raja sing maringi kalenggahan.* (barang siapa yang sudah diberikan jabatan harus mengikuti perintah Raja yang memberikan jabatan).

Keempat, *sing gelem lan ngrumangsani bagian saka alam lan gelem nyawiji karo alam, kuwi sing pantes diparingi lan diparengake ngleksanaake dhawuh lan isa diugemi yaiku: - pangucape isa diugemi - ngrumangsani sopo to sejatine -ngugemi asal usule. - kang gumelar iki wis*

ono kang noto. Dumadi onolir gumanti ora kepareng dirusuhi. (Siapa saja yang merasa bagian dari alam dan mau menjadi satu dengan alam, dialah yang layak diberi dan diperbolehkan melaksanakan perintah dan bisa dipercaya. Ucapannya harus bisa dipercaya, tahu siapa jati dirinya, menghayati asal-usulnya. Bagian ini sudah ada yang mengatur. Bila ada pergantian, tidak boleh diganggu).

Kelima, sing disebut tedak turun kraton, sopo wae lanang utowo wedok, durung mesti diparengake ngleksanaake dhawuh kalenggahan. Kang kadhawuhake wis tinitik. Dadi yen ono kang omong babagan kalenggahan Nata Nagari Mataram, sopo wae, luwih-luwih pengageng pangembating projo ora diparengake, lir e kleru utowo luput. (Yang disebut keturunan keraton, siapa saja laki-laki atau perempuan, belum tentu bisa melaksanakan perintah untuk mendapatkan kedudukan Raja. Yang diberi wewenang sudah ditunjuk. Jadi, tidak ada yang diperbolehkan membahas atau membicarakan soal takhta Mataram, terlebih-lebih para pejabat istana, khawatir terjadi kekeliruan).

Keenam, anane sabdatama, kanggo ancer-ancer parembagan opo wae, uga paugeran kraton, semana uga negara, gunakake undang-undang. (*sabdatama* ini dimunculkan sebagai rujukan untuk membahas apa saja, juga menjadi tata cara keraton dan negara, dan berlaku seperti undang-undang).

Ketujuh, sabdatama kang kapungkur kawedarake jumbuh anane undang-undang keistimewaan, jumbuh anane perdais dan danais. (*sabdatama* yang lalu terkait perda istimewa dan dana istimewa).

Kedelapan, Yen butuh mbenerake undang-undang keistimewaan, sabdo tomo lan ngowahi undang-undange. Kuwi kabeh dhawuh kang perlu dimangerteni lan diugemi. (jika membutuhkan untuk memperbaiki Undang-Undang Keistimewaan, dasarnya *sabdatama*. Itulah perintah yang harus dimengerti dan dilaksanakan).

Larangan itu disampaikan Sultan bagi seluruh keluarga keraton dan warga Yogyakarta dan tidak seorang pun bisa memutuskan persoalan Mataram, apalagi yang berkaitan dengan urusan kedudukan di tatanan pemerintahannya. *Sabdatama* tersebut harus dijadikan rujukan untuk urusan apa pun di Keraton Yogyakarta. Pembacaan *sabdatama* tersebut berlangsung singkat.

Para kerabat keraton pun enggan memberikan komentar akan latar belakang munculnya sabda raja tersebut. Di antara kerabat Keraton, yang hadir, seperti KGPH Hadiwinoto, GBPH Prabukusumo, GBPH Yudhaningrat, Gusti Cakraningrat, juga tampak Bupati Gunungkidul Badingah, dan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti. Pengageng Tepas Tondo Yekti Keraton Yogyakarta KRT Yudohadiningrat mengatakan *sabdatama* ini tidak ada kaitan dengan pembahasan raperdais tata cara pengisian jabatan gubernur yang sedang dibahas oleh DPRD DIY. Yang mempunyai kewenangan untuk menyusun dan menetapkan tata cara pengisian gubernur dalam menjabarkan Perda Keistimewaan (Perdais) itu kewenangan DPRD dan pemda. Sedangkan untuk kesultanan menjadi kewenangan raja.

Sedang Parentah Hageng Keraton Yogyakarta Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Yudahadiningrat mengatakan *sabdatama* merupakan perintah bagi warga Keraton Yogyakarta untuk tidak mengomentari suksesi raja. "Pada waktunya nanti, sultan sendiri yang akan berbicara tentang pewaris takhtanya," katanya. Adik Sri Sultan HB X, GBPH Prabokusumo mengatakan Sri Sultan memberi perintah sangat mendadak. Dia bahkan tidak mengetahui rencana akan adanya *sabdatama*. "Baru tadi pagi saya ditelepon, mendadak sekali. Pada prinsipnya, tidak setiap orang bisa menduduki, tidak boleh komentar," kata Prabokusumo. Menurutnya, *sabdatama* tersebut berkaitan dengan isu panas yang beredar di masyarakat terkait pengisian jabatan gubernur dalam Perdasas Pasal 3 Ayat (1) huruf m tentang persyaratan gubernur DIY.

Banyak yang mengaitkan hal tersebut dengan suksesi di Keraton Yogyakarta karena salah satu syarat gubernur adalah Sri Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta. "Ini bentuk pernyataan Sri Sultan untuk menjawab polemik yang ada di masyarakat di mana beliau menegaskan bahwa keraton memiliki cara sendiri untuk mengatasi permasalahan yang ada yaitu melalui *sabdatama* ini. Prinsipnya kami akan menaati dan tidak akan banyak berkomentar terkait hal tersebut, untuk bagaimanannya *monggo* terserah pada masyarakat saja," ucapnya (FLAMMA Edisi 15, *Serial Polimik Keistimewaan*, IRE, Yogyakarta).

3. Teori Konflik

Teori konflik muncul pada abad ke 18 dan 19 dapat dimengerti sebagai respon dari lahirnya *dual revolution* yaitu demokratisasi dan industrialisasi. Berbagai varian dari teori konflik ini bermunculan dalam khazanah studi penyimpangan. Beberapa diantaranya adalah :

Para penulis pendekatan konflik pada masa kini melihat perilaku kriminal sebagai suatu refleksi dari kekuasaan yang memiliki perbedaan dalam mendefinisikan kejahatan atau penyimpangan. Ada sebagian pemikir konflik kontemporer yang mendefinisikan kriminalitas sebagai suatu fungsi dari posisi kelas social. Menurut Webster, istilah konflik didalam bahasa aslinya berarti suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak (Jefry Rubin, 2004: 09). Namun sesuai perkembangan makna konflik yang tersebut diatas menjadi semakin luas dan beresiko kehilangan statusnya sebagai sebuah konsep tunggal. Konflik juga dapat di artikan sebagai suatu perbedaan persepsi mengenai suatu kepentingan dimana ada dua pihak yang mempunyai persepsi tentang tujuannya yang berbeda dengan pihak lainnya.

Coser menyatakan melalui *The Function Of Social Conflict* (1957) bahwa konflik terbagi menjadi dua yaitu konflik eksternal dan konflik internal. Konflik eksternal mampu menciptakan dan memperkuat identitas kelompok. Ia menyatakan bahwa konflik membaut batasan-batasan diantara dua kelompok dalam *system social* dengan memperkuat kesadaran dan kesadaran kembali atas keterpisahan sehingga menciptakan kesadaran

identitas kelompok dalam *system*. Sedangkan konflik internal (*internal conflict*) memberi fungsi positif terhadap kelompok identitas mengenai adanya kesalahan perilaku.. Ada perilaku anggota yang dianggap menyimpang dari teks norma kelompok sehingga perlu dikoreksi oleh kelompok tersebut. Selain itu konflik internal merupakan mekanisme bertahan dari eksistensi suatu kelompok (Novri, 2010: 61-62).

Konflik bukan merupakan sesuatu yang baru didunia manusia, manusia sebagai makhluk social selalu berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Ketika berinteraksi akan selalu diwarnai oleh dua hal yaitu konflik dan kerja sama. Dengan demikian konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia. Konflik berasal dari kata kerja latin yaitu “*configure*” yang berarti saling memukul. Secara sosiologis konflik diartikan sebagai suatu proses social antara dua orang atau lebih (bisa juga berkelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, konflik diartikan sebagai percekocokan, perselisihan, pertentangan. Menurut Kartono dan Gulo konflik berarti ketidaksepakatan dalam satu pendapat emosi dan tindakan dengan orang lain. Dari berbagai sumber dikatakan bahwa yang dimaksud dengan konflik adalah (Liliweri, 2005: 249-250):

- a) Bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok, karena mereka yang terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai dan kebutuhan.
- b) Hubungan pertentangan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran

tertentu namun diliputi pemikiran, perasaan atau perbuatan yang tidak sejalan.

- c) Pertentang atau pertikaian karena ada perbedaan dalam kebutuhan, nilai, motivasi pelaku atau yang terlibat didalamnya.
- d) Proses yang terjadi karena satu pihak secara negative mempengaruhi pihak lain, dengan melakukan kekerasan fisik yang membuat perasaan dan fisik orang lain terganggu.
- e) Bentuk pertentang yang bersifat fungsional, karena pertentangan semacam itu mendukung tujuan kelompok dan memperbaharui tampilan, namun disfungsional karena menghilangkan tampilan kelompok.
- f) Proses mendapatkan monopoli ganjaran, kekuasaan, pemilikan dengan menyingkirkan atau melemahkan para pesaing.

Dalam menganalisis mengenai konflik, kita harus mengikutsertakan sosiologi dari konflik tersebut. Sosiologi konflik mempunyai asumsi bahwa masyarakat selalu dalam kondisi pertentangan, pertikaian, dan perubahan. Semua itu adalah sebagai bagian dari terlibatnya kekuatan-kekuatan masyarakat dalam saling berebut sumber daya langka dengan menggunakan nilai-nilai dan ideology sebagai alat untuk meraihnya. Hal ini sama dengan asumsi sosiologi pengetahuan Berger dan Luckmann yang menyebutkan adanya momen dialektis dalam masyarakat yang melibatkan kelompok-kelompok kepentingan dan ideology. Dahrendorf menyebut analisisnya dengan konflik dialektis yang menjelaskan proses terus menerus distribusi kekuasaan dan wewenang diantara kelompok-kelompok terkoordinasi (*imperiallly coordinate*

association). Dengan demikian kenyataan social bagi Dahrendorf merupakan siklus tak berakhir dari adanya konflik wewenang dalam bermacam-macam tipe kelompok terkoordinasi dari sistem social.

Istilah sosiologi konflik pertama kali di perkenalkan oleh George Simmel dalam *American Journal of Sociology* pada tahun 1903. Ibnu Khaldun (1332-1406), Karl Mark (1818-1883), Emile Durkheim (1879-1912), Max Weber (1864-1920) dan George Simmel (1864-1920) merupakan tokoh-tokoh dari teori sosiologi konflik yang berperan dasar dalam meletakkan mainstream teori social secara umum dan mempengaruhi teori sosiologi kontemporer pada khususnya. Dalam teori ini sosiologi konflik terbagi menjadi dua musim yang pertama teori sosiologi konflik klasik dan yang kedua adalah teori sosiologi kontemporer.

Menurut teori sosiologi konflik klasik konflik berasal dari sejarah panjang sistem penindasan oleh kaum borjuis terhadap kaum proletar, dimana kaum borjuis merupakan kelas yang memiliki modal besar seperti uang dan nilai untuk menciptakan alat dan sistem produksi yang dengan semua itu sebenarnya mereka telah mendapatkan untung yang besar yang dapat memenuhi kebutuhan manusia pada umumnya.

Mereka mengambil '*over value of production*' yang keuntungan dari seluruh proses produksi mereka ambil sendiri. Proses ini menciptakan akumulasi modal ditangan kelas borjuis dan pada saat yang bersamaan kelas proletariat dimiskinkan oleh sistem kapitalisme sejak mereka tidak memperoleh keuntungan yang adil yaitu hak-hak terhadap komoditas yang

mereka ciptakan. Kelas proletariat menjadi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.

Karl Marx menyatakan bahwa ada tiga prinsip sosiologi konflik yaitu *pertama*, manusia secara alamiah memiliki angka kepentingan. Jika seseorang bertindak tidak diatas kepentingan alamiah tersebut berarti mereka telah dicurangi dari kepentingan yang sebenarnya. *Kedua*, konflik dalam sejarah masyarakat kontemporer adalah akibat benturan kepentingan kelompok-kelompok sosial. Dimana menurut marx kemudian bahwa “tanpa konflik tidak ada perkembangan itu adalah hukum pada peradaban sampai sekarang”, yang *ketiga* adalah melihat keterkaitan ideologi dan kepentingan. Bagi marx gagasan dari suatu zaman adalah refleksi dari kepentingan ‘rulling class’.

Disamping pengertian tentang konflik, terdapat juga penyebab-penyebab terjadinya sebuah konflik dan dampak dari konflik itu sendiri.

a. Faktor-faktor Penyebab Konflik

Beberapa ilmuwan mempunyai persepsi tentang akar dari terjadinya konflik diantaranya yaitu Robbins, Robbins mengatakan bahwa ada beberapa penyebab dari konflik yaitu *pertama*, komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk terjadi akibat kesalahpahaman dalam menyampaikan suatu informasi baik secara tertulis maupun lisan. Dalam suatu penelitian menyebutkan bahwa kesulitan semantik, pertukaran informasi yang tidak cukup, dan gangguan dalam saluran komunikasi merupakan penghalang terhadap komunikasi dan menjadi kondisi antesden untuk terciptanya konflik. Yang *kedua* adalah struktur dimana dalam suatu

organisasi setiap individu mempunyai tujuan yang berbeda dengan individu lainnya, misalnya dalam suatu struktur kepengurusan organisasi ketua mempunyai tujuan yang berbeda dengan anggotanya dan jika hal ini tidak menghasilkan suatu kesepakatan maka dapat menimbulkan konflik.

Yang *ketiga* adalah variable pribadi yaitu sistem nilai yang dimiliki tiap-tiap individu, karakteristik kepribadian yang menyebabkan individu memiliki keunikan (*idiosyncrasies*) dan berbeda dengan individu yang lain. Kenyataan menunjukkan bahwa tipe kepribadian tertentu, misalnya individu yang sangat otoriter, dogmatik, dan menghargai rendah orang lain merupakan sumber konflik yang potensial.

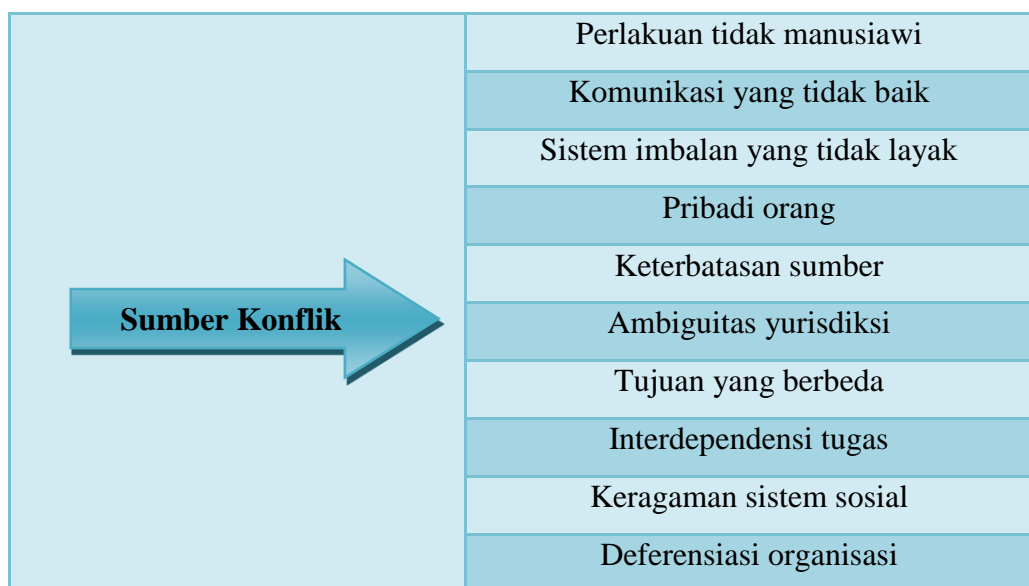
Sejumlah tokoh memulai karirnya sebagai pemimpin politik dengan menciptakan konflik untuk menciptakan perubahan. Kemudian mereka memaanajemeni konflik tersebut dengan baik dan menggerakkan para pengikutnya untuk menghancurkan rezim yang berkuasa dan menggantinya dengan rezim baru. Kemudian berkembangnya masyarakat madani atau masyarakat sipil juga menjadi penyebab terjadinya konflik dan meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Masyarakat sipil (*civil society*) memberdayakan warga Negara terhadap pemerintah, warga Negara bukan lagi objek pemerintah melainkan subjek yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, pemerintah ada untuk melayani warga negara bukan warga negara untuk melayani pemerintah dan seringkali terjadi ketimpangan antara kehendak rakyat dan apa yang dilakukan oleh pemerintah, ketimpangan ini yang menyebabkan terjadinya konflik antara rakyat dengan pemerintah. Konflik juga terjadi karena kecenderungan masyarakat yang belum siap berdemokrasi. Bisa kita lihat ketika

diselenggarakan pemilu baik DPR-RI maupun DPRD seringkali pihak yang kalah suara menggugat bahwa pemilihan tidak dilakukan dengan jujur dan adil ataupun terjadi kecurangan dalam pemilihan dan akhirnya pemimpin partai mengerahkan massanya untuk melakukan demonstrasi. Massa kandidat yang kalah berhadapan dengan massa kandidat yang menang, sehingga menimbulkan benturan fisik. Penyebab konflik ini adalah karena pemimpin dan massanya belum siap menghadapi kekalahan dalam pemilihan langsung. Selanjutnya permasalahan ekonomi juga menjadi penyebab terjadinya konflik, konflik antara petani dengan perusahaan atau Departemen Kehutanan dan lembaga pemerintah mengenai lahan/tanah pertanian. Konflik juga terjadi antar kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya (Wirawan, 2010: 2-3).

Berikut adalah bagan sumber terjadinya konflik :

Tabel 1.1

Sumber Terjadinya Konflik



b. Pengaruh atau Dampak Konflik

Konflik mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan umat manusia, baik secara individual maupun kelompok. Konflik mempunyai pengaruh secara positif dan negatif. Kedua pengaruh tersebut menciptakan perubahan bagi kehidupan manusia. Konflik dapat mengubah dan mengembangkan kehidupan manusia.

1) Dampak Positif Konflik

Konflik selama ini dipandang sebagai sebuah keburukan, sesuatu yang sangat dihindari, padahal konflik memiliki pengaruh positif terhadap umat manusia. Diantaranya yaitu :

a) Menciptakan perubahan

Konflik berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Konflik dapat mengubah dan mengembangkan kehidupan umat manusia. Konflik antara penjajah Indonesia dengan bangsa Indonesia sendiri telah menghasilkan kemerdekaan pada tanggal 14 Agustus 1945. Di negara lain pun sama halnya.

b) Membawa objek konflik ke permukaan

Tanpa terjadinya konflik, objek konflik atau masalah yang terpendam diantara pihak-pihak yang terlibat konflik tidak akan muncul ke permukaan. Tanpa munculnya objek konflik, masalah tersebut tidak mungkin diselesaikan.

c) Memahami orang lain lebih baik

Konflik membuat orang memahami adanya orang lain, dalam hal ini adalah musuh yang berbeda pendapat, berbeda pola pikir dan berbeda

karakter. Perbedaan tersebut perlu dimanajemen lebih baik agar menghasilkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

d) Menstimulus cara berpikir yang kritis dan meningkatkan kreativitas

Orang harus memahami mengapa lawan konfliknya mempunyai pendapat yang berbeda dan mempertahankan pendapatnya.

e) Manajemen konflik dalam menciptakan solusi terbaik

Jika diolah dengan baik, konflik dapat menghasilkan solusi yang memuaskan kedua belah pihak yang terlibat. Dan solusi tersebut akan menghilangkan perbedaan mengenai objek yang dijadikan konflik.

f) Konflik menciptakan revitalisasi norma

Norma yang berkembang dan mengatur kehidupan masyarakat berkembang lebih lambat, perubahan norma seringkali diawali dengan perbedaan pendapat yang melahirkan konflik. Apabila dapat diolah secara baik maka norma baru yang lebih baik akan dapat diciptakan.

2) Dampak Negatif Konflik

Konflik juga dapat memberi pengaruh yang negatif misalnya *pertama*, biaya konflik. Konflik memerlukan biaya untuk melakukan transaksi misalnya bentuk sumber-sumber, energy fisik, energy psikologi, uang, waktu, dan peralatan. Makin tinggi intensitas konflik maka akan semakin tinggi pula biaya yang perlu dikeluarkan. *Kedua*, merusak hubungan dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat konflik. Konflik dapat menurunkan kualitas dan intensitas hubungan diantara pihak-pihak yang terlibat konflik. Konflik dapat menimbulkan rasa yang tidak senang, marah, benci, antisipasi, dan agresi kepada lawan konflik. *Ketiga*, merusak system organisasi. Organisasi merupakan sistem sosial yang unit kerjanya

termasuk anggotanya saling berhubungan, saling membantu, dan saling tergantung satu sama lain dalam mencapai tujuan organisasi, namun jika ternyata dalam kinerjanya terjadi konflik maka produksi organisasi akan mengalami hambatan dan tidak maksimal. *Keempat*, menurunkan mutu pengambilan keputusan. Konflik yang konstruktif dapat membantu dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan alternatif yang diperlukan, namun jika konflik mengarah kepada destruktif maka akan menghasilkan kebuntuan, fitnah, agregasi, dan sabotase serta menghilangkan rasa percaya diri. Situasi seperti ini tidak mungkin mengembangkan sumber alternatif dalam pengambilan keputusan. *Kelima*, kehilangan waktu kerja. Jika konflik bersifat destruktif, 10-30% waktu manajer dan bawahannya digunakan untuk menyelesaikan konflik. Hal ini mengurangi waktu untuk menghasilkan produksi dan menurunkan produktivitas organisasi. *Keenam*, sikap dan perilaku negatif. Konflik dapat menurunkan semangat motivasi kerja, komitmen berorganisasi, absentisme, rasa saling percaya serta sabotase dan pencurian. *Ketujuh*, kesehatan. Konflik yang menyebabkan perasaan marah, kecewa, dan lain sebagainya memungkinkan orang untuk meningkatnya tekanan darah, terkena stroke dan penyakit berbahaya lainnya (Wirawan, 2010: 106-111).

3) Resolusi Konflik

Resolusi konflik merupakan proses untuk pencapaian keluaran konflik. Penyelesaian konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik. Metode dalam meresolusi sebuah

konflik dapat dikelompokkan menjadi pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik (self regulation), atau melalui intervensi pihak ketiga (third party intervention). Resolusi konflik melalui pengaturan sendiri terjadi jika para pihak yang terlibat konflik berupaya menyelesaikan sendiri konflik mereka. Sedangkan intervensi pihak ketiga terdiri atas resolusi melalui pengadilan, proses administratif, dan resolusi perselisihan alternatif.

Dalam resolusi konflik melalui pengaturan sendiri, pihak-pihak yang terlibat konflik menyusun strategi konflik dan menggunakan taktik konflik untuk mencapai tujuan terlibat konfliknya. Pihak-pihak yang terlibat konflik saling melakukan pendekatan dan negoisasi untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan jalan keluar yang mereka harapkan. Dalam resolusi konflik ini dapat menggunakan dua pola yaitu pola tanpa kekerasan atau pola dengan kekerasan. Pola tanpa kekerasan ini dapat dilakukan dengan cara demonstrasi damai dan pembangkangan publik. Hal ini tentu tidak berhubungan dengan kelukaan fisik namun kadang hanya berupa luka psikologis misalnya kekecewaan.

Jika menggunakan pola kekerasan artinya resolusi kadang menimbulkan luka fisik. Pola kekerasan diartikan sebagai perilaku pihak yang terlibat konflik yang dapat melukai lawan konfliknya demi untuk memenangkan konflik. Resolusi konflik juga dapat intervensi orang ketiga misalnya melalui proses pengadilan, pendekatan legislasi, dan melalui proses administrasi (Wirawan, 2010: 177).

F. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional merupakan suatu pengertian dari gejala yang menjadi pokok perhatian. Definisi konseptual dimaksudkan sebagai gambaran yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian atas batasan tentang istilah yang ada dalam pokok permasalahan.

1. Sabdaraja Hamengku Buwono ke-X adalah Keputusan Raja Kraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X berisi pengangkatan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayung menjadi Putri Mahkota.
2. Konflik internal kraton adalah suatu proses keadaan dimana dua atau lebih dari pihak-pihak masyarakat atau abdi dalem kraton yang terlibat melakukan perbedaan, perselisian dan perseteruan dengan berusaha mengagalkan tujuan dari masing-masing pihak.
3. Masyarakat Yogyakarta adalah sekelompok atau individu masyarakat yang tinggal atau menggantungkan hidupnya di Daerah Istimewah Yogyakarta (DIY).

G. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional dapat dilihat dari:

1. Persepsi masyarakat Kota Yogyakarta tentang Sabdaraja Hamengku Buwono Ke-X
2. Adanya polemik sabdaraja sehingga terjadinya konflik internal Kraton
3. Munculnya pro-kontra dilingkungan masyarakat Yogyakarta.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari segala peraturan yang terdapat dalam penelitian. Bila ditinjau dari sudut filsafat, metode penelitian merupakan epistemologi kita dalam mengadakan penelitian. Ada beberapa bagian yang tak terpisahkan dari metode penelitian yang penulis menganggap signifikan untuk disampaikan dalam penelitian ini. Bagian-bagian tersebut adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif kualitatif yang berasal dari pendekatan *interpretative* (subjektif). Penelitian sosial menggunakan format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas, berbagai kondisi, sebagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, model, tanda, atau gambar tentang situasi dan fenomena tertentu (Bungin, Burhan. 2011: 68). Penelitian ini penulis akan menjabarkan pendapat-pendapat masyarakat Kota Yogyakarta terhadap sabda raja Hamengku Buwono ke-X dalam konflik internal kraton.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yaitu terhadap masyarakat Kota Yogyakarta mengingat munculnya pro-kontra sabdaraja sehingga menimbulkan konflik internal kraton. Hal ini ditulis karena penulis tertarik untuk mengetahui Persepsi masyarakat Kota Yogyakarta tentang Sabdaraja Hamengku Buwono Ke-X.

3. Jenis Data

Data merupakan informasi mengenai keberadaan konsep penelitian yang diperoleh dari unit analisa yang menjadikan sebagian sarana verifikasi empiris dalam kegiatan penelitian. Adapun jenis data yang digunakan adalah data primer dan skunder karena dalam memperoleh data bisa dilakukan langsung dengan objek penelitian maupun buku-buku, koran, internet serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

Ada dua jenis data yang penulis gunakan yakni data primer dan data sekunder. *Pertama* data primer adalah data yang diperoleh dari responden berupa keterangan pihak-pihak terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. *Kedua* sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari hasil atau bahan-bahan dokumentasi tentang objek penelitian. Data sekunder diperoleh melalui syudi kepustakaan atau *library research*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

a) Wawancara

Wawancara adalah kegiatan percakapan dengan maksud tertentu. Dilakukan oleh dua pihak atau lebih antara pewawancara dengan narasumber. Dalam penelitian ini narasumber menjadi sasaran penulis adalah orang yang mempunyai sifat khusus atau masyarakat asli Kota Yogyakarta. Informasi yang ingin penulis ketahui melalui wawancara dengan beberapa orang diantaranya adalah berupa informasi mengenai politik sabdaraja, selanjutnya terkait dengan pro-kontra masyarakat Kota Yogyakarta terhadap munculnya sabdaraja Sri Sultan Hamengku Buwono X.

b) Dokumentasi

Dokumentasi dapat dianggap sebagai materi yang tertulis atau sesuatu yang menyediakan informasi tentang suatu subjek. Dokumentasi juga dapat berisi tentang penjelasan-penjelasan, bagian alur, daftar-daftar, koran, cetakan hasil komputer, contoh obyek dari sistem informasi (Mukhlis.staff.gunadarma.ac.id akses pada Kamis 29 Oktober 2015). Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data melalui dokumentasi yang diperoleh baik dari masyarakat Kota Yogyakarta maupun yang diperoleh melalui buku, koran, majalah, internet atau dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan sabdaraja.

5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif, yaitu menganalisis data tanpa berdasarkan angka-angka perhitungan melainkan atas pandangan, pendapat dan analisis data. Pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada prosespenyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika alamiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa pendekatan diantaranya yaitu pendekatan grounded, dimana pendekatan ini digunakan berdasarkan pemikiran pokok yang menempatkan realitas sosial sebagai hasil dari berkerjanya proses interpretatif individu atas struktur yang didalamnya melibatkan berbagai proses pemaknaan subyektif dari intersubyektif.

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data. Langkah-langkahnya diawali dengan membaca dan menelaah terhadap berbagai sumber data yang berkaitan dengan munculnya persepsi masyarakat terhadap sabdaraja Sultan Hamengku Buwono X.

